

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

• 2021 •

<https://mukomukokab.bps.go.id>



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

● 2021 ●

<https://mukomukokab.bps-go.id>



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
2021

No. ISSN :
No. Katalog : 7203003.1706
No. Publikasi : 17060.2222
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 30 Halaman

Naskah

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko

Penyunting

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko

Gambar Kulit

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko

Diterbitkan Oleh

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KABUPATEN MUKOMUKO

2021

Anggota Tim Penyusun :

Pengarah : Khomarudin, SST.

Penyunting : Tri Utami S.Tr.Stat.

Penulis : Tri Utami S.Tr.Stat.

Pengolah Data : Tri Utami S.Tr.Stat.

Pemeriksa Tabel : Sapta Apriyenti, S.P.

<https://mukomukokab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko menjadi produk yang strategis dalam melihat kemampuan fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Publikasi diterbitkan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik keuangan pemerintah daerah.

Publikasi ini memuat data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada tahun 2019-2020. Data dimaksud merupakan hasil kompilasi yang dilakukan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko dan Pemerintah Daerah.

Konsep definisi dan metode pengumpulan data yang dijelaskan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengguna dalam memanfaatkan data yang disajikan.

Saran dan tanggapan dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Mukomuko, September 2022
**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUKOMUKO
KEPALA,**

Khomarudin, SST.
NIP. 197512091999011001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1 Pendahuluan	3
1.2 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	3
1.3 Konsep dan Definisi	3
BAB II ANALISI STATISTIK KEUANGAN	11
2.1 Rasio PAD.....	13
2.2 Rasio Bagi Hasil.....	15
2.3 Rasio Transfer	17
2.4 Rasio DAU dan DAK	18
2.5 Rasio Belanja Pegawai	19
2.6 Rasio Belanja Modal	20
2.7 Rasio Government Size	21
2.8 Laju Pertumbuhan PAD.....	22
2.9 Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan	23
2.10 Laju Pertumbuhan PDRB	25
BAB III LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (Ribu Rupiah)	15
Tabel 2	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (Ribu Rupiah)	29
Tabel 3	Realisasi Rincian Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (Ribu Rupiah)	29
Tabel 4	Realisasi Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (Ribu Rupiah)	30
Tabel 5	Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan PAD, dan Pertumbuhan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2020 (Ribu Rupiah)	30

<https://mukomukokab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rasio PAD dan Bagi Hasil Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (persen)	14
Gambar 2	Rasio Transfer Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (persen)	16
Gambar 3	Rasio Transfer Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (persen)	17
Gambar 4	Rasio DAU dan DAK Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (persen)	18
Gambar 5	Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (persen)	19
Gambar 6	Rasio Belanja Modal Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (persen)	20
Gambar 7	Rasio Government Size Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (persen)	21
Gambar 8	Laju Pertumbuhan PAD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2020 (persen)	22
Gambar 9	Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2020 (persen)	24
Gambar 10	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (persen).....	25

<https://mukomukokab.bps.go.id>

BAB I
PENJELASAN UMUM

1.1 Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko secara umum menyajikan data tentang Pendapatan dan Belanja seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko ini, antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan masing-masing Pemerintah di Kabupaten Mukomuko
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko
- c. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk Pemerintahan di Kabupaten Mukomuko

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai indikator tentang potensi dan kemampuan dari masing-masing Pemerintah Daerah dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

1.2 Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko diperoleh dari Dinas BKD (Badan Keuangan Daerah).

Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan Daftar K-1 dan K-2. Sumber data diperoleh dari Badan Keuangan Daerah.

1.3 Konsep dan Definisi

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Adalah realisasi/penghitungan APBD pada tiap tahun anggaran

A. Pendapatan Daerah

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Dana Perimbangan

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21) dan lain-lain.

2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Bagi hasil bukan pajak berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan (IHPH), pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat

2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dan alokasi umum

- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. Belanja Daerah

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung.
- b. Belanja Langsung.

2.1 Belanja Pegawai Langsung

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2 Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.3 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, computer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

C. Pembiayaan Daerah

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
 - b) Transfer dari Dana Cadangan
 - c) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
 - d) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a) Transfer ke Dana Cadangan
 - b) Penyertaan Modal
 - c) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu

Adalah selisih lebih Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

b. Dana Cadangan

Adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Belanja Tidak Tersangka adalah semua pengeluaran/ belanja yang tidak terduga pada tahun anggaran yang diteliti. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana

alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

c. Pinjaman dan Obligasi

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal.

d. Aset Daerah

Adalah semua harta kekayaan milik daerah, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

e. Utang Daerah

Adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Adalah merupakan selisih lebih dari surplus/ defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Tabel Neraca Sumber dan Penggunaan Dana Keuangan Daerah

No	Sumber	No.	Penggunaan
A.	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)	B.	BELANJA DAERAH (1 + 2)
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH		1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.1	Hasil Pajak Daerah	1.1	Belanja Pegawai
1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.2	Belanja Bunga
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.3	Belanja Subsidi
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.4	Belanja Hibah
	2. DANA PERIMBANGAN	1.5	Belanja Bantuan Sosial
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.8	Belanja Tidak Terduga
	3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		2. BELANJA LANGSUNG
3.1	Pendapatan Hibah	2.1	Belanja Pegawai
3.2	Dana Darurat	2.2	Belanja Barang dan Jasa
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lain	2.3	Belanja Modal
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Da	D.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.6	Lainnya.....	1.1	Pembentukan Dana Cadangan
	C. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.3	Pembayaran Pokok Utang
1.2	Pencairan Dana Cadangan	1.4	Pemberian Pinjaman Daerah
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.5	Lainnya.....
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	E.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (A+C-B-D)
1.6	Penerimaan Piutang Daerah		
1.7	Lainnya.....		

Rasio Penerimaan Asli Daerah (Rasio PAD)

Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah. Rasio PAD adalah perbandingan antara besarnya PAD suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ PAD = \frac{Jumlah\ PAD\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio Dana Perimbangan (Rasio Transfer)

Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio transfer adalah perbandingan antara besarnya jumlah transfer yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ Transfer = \frac{Jumlah\ transfer\ yang\ diterima\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio Bagi Hasil

Merupakan indikator yang menunjukkan potensi pendapatan keuangan daerah dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Rasio Bagi Hasil adalah perbandingan antara besarnya dana bagi hasil yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ Bagi\ Hasil = \frac{Jumlah\ dana\ bagi\ hasil\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

Rasio DAU dan DAK

Merupakan indikator yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal pemerintah. Rasio DAU dan DAK adalah perbandingan antara besarnya DAU dan DAK yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio\ DAU\ dan\ DAK = \frac{Jumlah\ DAU\ dan\ DAK\ daerah}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah} \times 100\%$$

Government Size

Secara terminologi merupakan ukuran belanja pemerintah atau bisa juga merupakan ukuran pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah. Secara matematis, government size merupakan rasio antara total belanja pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$$S = \frac{\text{Jumlah Belanja daerah}}{\text{PDRB daerah}} \times 100\%$$

<https://mukomukokab.bps.go.id>

BAB II
ANALISIS STATISTIK KEUANGAN

<https://mukomukab.bps.go.id>

ANALISIS DESKRIPTIF STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Analisis terhadap kondisi keuangan suatu pemerintah daerah bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana kemampuan pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, seperti untuk membayar gaji aparatur daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak, monitoring, pembinaan, membuat deregulasi dan pelayan administrasi bagi keberlangsungan perkembangan sektor-sektor perekonomian di daerah juga untuk menstimulasi sektor-sektor tersebut agar dapat terus berkembang.

Keuangan daerah yang mandiri tercermin dari besarnya proporsi sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini sangat terkait dengan potensi daerah. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat bisa diamati dari besarnya proporsi dana transfer atau dana perimbangan.

2.1 PAD dan Rasio PAD

Berdasarkan rasio PAD dapat dilihat tingkat kemandirian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Rasio PAD dikelompokkan menjadi 4, yaitu rendah sekali jika Rasio PAD <25%, Rendah jika Rasio PAD 25-50%, Sedang jika Rasio PAD antara 50-75 persen, dan tinggi jika diatas 75%. Jika tingkat kemandirian suatu daerah "rendah sekali", dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sumber PAD antara lain berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah.

Rasio PAD Kabupaten Mukomuko cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tergolong pada kategori rendah sekali terhitung pada periode tahun 2017 sd 2020. Pada Tahun 2017 Rasio PAD Kabupaten Mukomuko sebesar 9,05 persen dari total Pendapatan Daerah, kemudian merangkak naik perlahan pada Tahun 2018 menjadi 10,09 persen namun nilainya turun cukup dalam ke angka 8,65 persen, kemudian meningkat kembali menjadi 9,65 persen pada



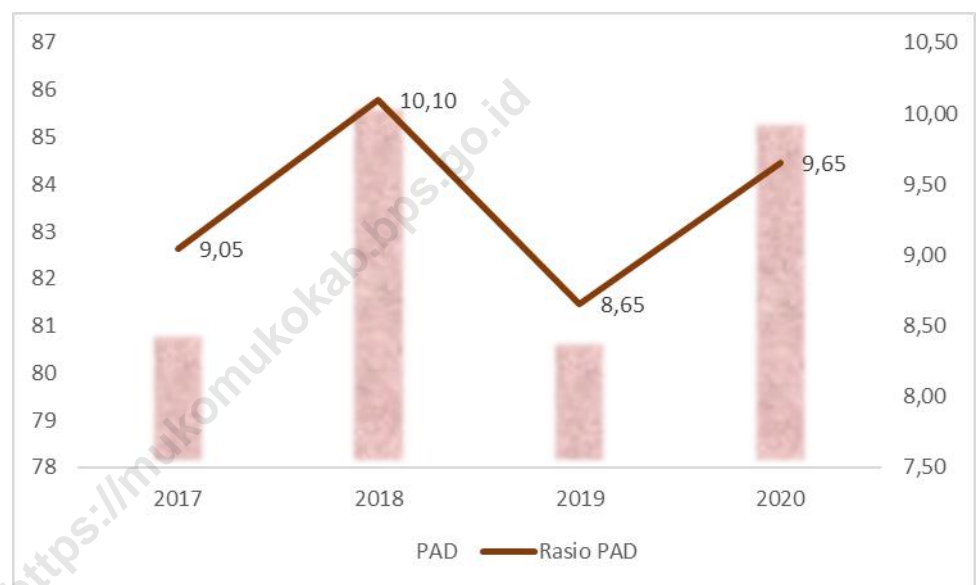
TAHU KAH KAMU

Tahun 2020 nilai PAD mengalami kenaikan tajam dari tahun sebelumnya dengan nilai 85,41 Miliar Rupiah.

tahun 2020. Sesuai dengan data yang dihimpun dari Portal Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), tercatat rekor tertinggi PAD Kabupaten Mukomuko dalam kurun waktu Tahun 2017 - 2020 mencapai 85,75 Miliar Rupiah pada Tahun 2018, sedangkan yang terendah pada Tahun 2019, yakni sebesar 80,76 Miliar Rupiah.

Sebagai gambaran berikut keadaan PAD Kabupaten Mukomuko dari Tahun 2017 -2020:

Gambar 1. PAD dan Rasio PAD Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020



2.2 Rasio Bagi Hasil



TAHU KAH KAMU

DBH terendah dialami Tahun 2020 19,13 Miliar Rupiah. hal ini disinyalir karena pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian terpuruk.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH Kabupaten Mukomuko dari Tahun 2017 - 2020 cenderung menurun dan terakhir pada Tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 19,13 Miliar Rupiah, sekaligus menjadi nilai DBH terendah selama kurun waktu 2017 - 2020. Hal ini disinyalir karena pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian terpuruk dan sebagian besar APBN dialokasikan untuk dana darurat dan keadaan mendesak kesehatan. Komponen DBH Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 terdiri dari:

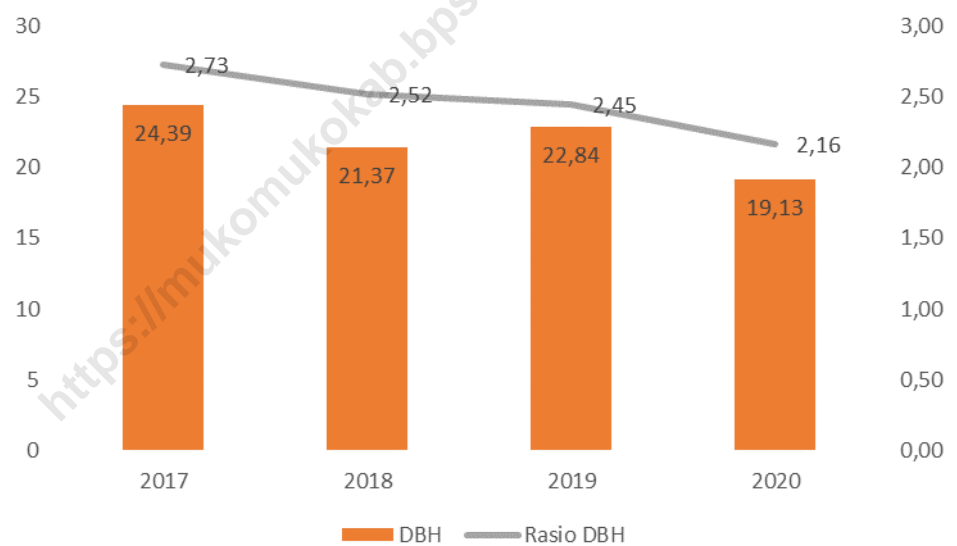
Tabel 1. Struktur DBH Kabupaten Mukomuko Tahun 2020

No	Komponen DBH	Nilai (Miliar Rupiah)
1	DBH PBB Bagi Rata	2,7
2	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	5,48
3	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	0,21
4	DBH PPh Pasal 21	3,67
5	DBH PPh Pasal 25/29 OP	0,17
6	DBH SDA Kehutanan - PSDH	0,02
7	DBH SDA Minerba - Royalti	6,01
8	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	0,06
9	DBH SDA Perikanan	0,79

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka DBH Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 turun 16,24 persen yakni dari 22,84 miliar rupiah menjadi 19,13 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan penurunan nilai pada beberapa komponen yakni DBH PBB Bagi Rata, DBH Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota, dan DBH SDA Minerba - Royalti.

Besaran nilai rasio bagi hasil sejatinya bukanlah hal yang positif untuk sebuah daerah. Pasalnya semakin besar rasio bagi hasil menunjukkan besarnya bantuan pemerintah pusat untuk daerah. Namun, dana bagi hasil yang dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan dampak yang positif untuk kemajuan sebuah daerah.

Gambar 2. DBH dan Rasio Bagi Hasil Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020



2.3 Rasio Transfer



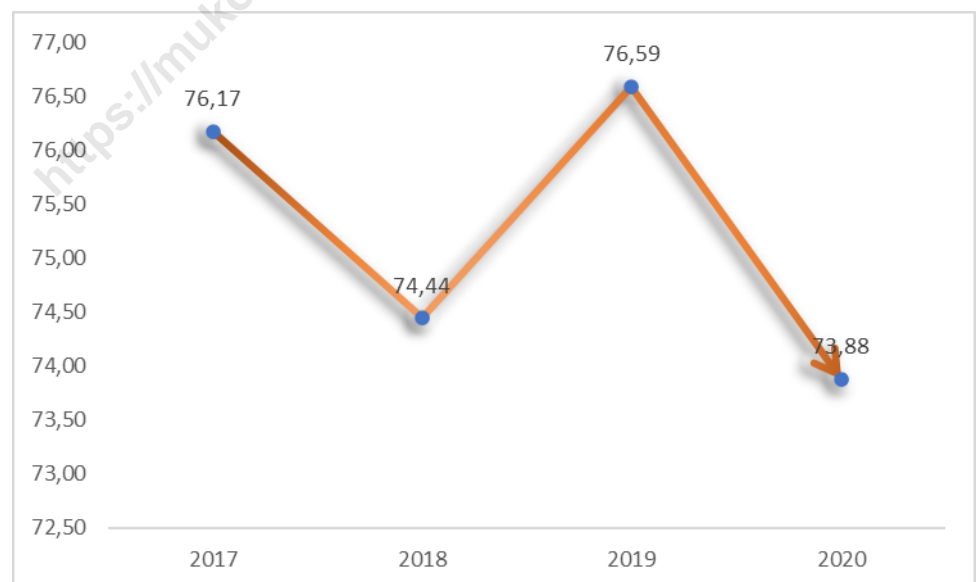
TAHU KAH KAMU

Komponen Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Mukomuko paling tinggi adalah Dana Alokasi Umum (DAU), yakni sebesar 457 Miliar Rupiah

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari dana keuangan pemerintah pusat. Rasio transfer menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat. Dalam publikasi ini dana transfer ke daerah yang dimaksud adalah dana transfer tanpa Dana Desa, hal ini dikarenakan Dana Desa langsung dikirimkan ke pemerintah desa tanpa ada interupsi dari pemerintah daerah.

Menurut data dari Badan Keuangan Daerah, Sejak tahun 2017 Rasio Transfer Kabupaten Mukomuko berfluktuasi namun cenderung menurun. Tercatat pada tahun 2017 Rasio transfer kabupaten Mukomuko adalah sebesar 76,17 persen, lalu turun pada Tahun 2018, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 76,59 persen namun turun cukup dalam pada Tahun 2020 hingga mencapai 73,88 persen saja.

Gambar 3. Rasio Transfer Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (persen)



2.4 Rasio DAU dan DAK



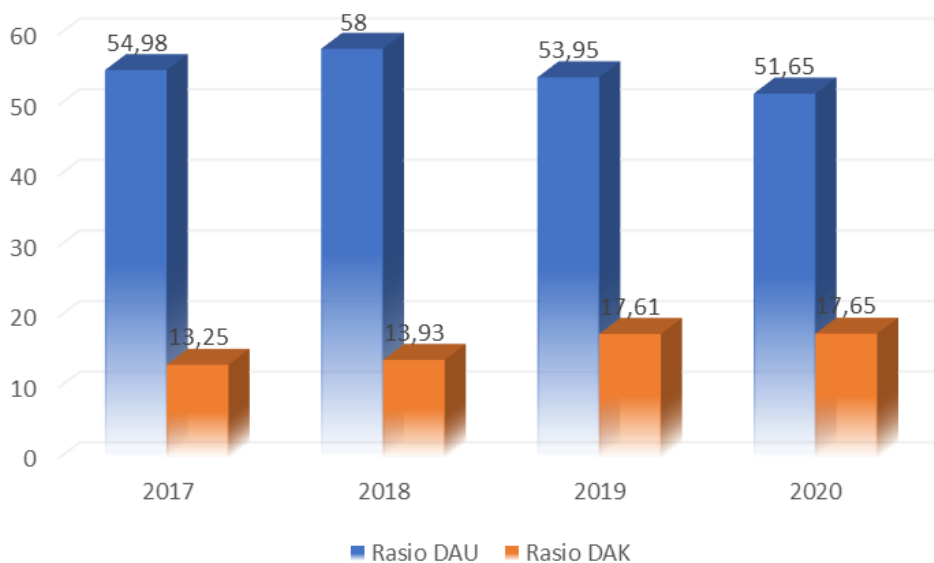
TAHU KAH KAMU

Proporsi nilai DAK Fisik Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 senilai 86,93 Miliar Rupiah, nilainya lebih tinggi daripada DAK Non Fisik yang hanya bernilai 69,22 Miliar Rupiah.

DAU dan DAK merupakan salah satu komponen Dana Transfer ke Daerah yang bersumber dari APBN. Akan tetapi bersumber dari dana perimbangan/transfer selain bagi hasil pajak/bukan pajak, sehingga rasio transfer biasanya berbanding lurus terhadap rasio DAU dan DAK. terkadang Rasionya tidak berbanding lurus jika proporsi Rasio bagi hasil pada tahun tersebut terlalu besar.

Pada periode 2017-2020 Rasio DAU Kabupaten Mukomuko cenderung menurun dan memiliki rasio yang tinggi (diatas 50 persen). Pada tahun 2017 Rasio DAU adalah sebesar 54,98 persen, lalu naik perlahan menjadi 58,00 persen pada Tahun 2018, dan mengalami penurunan bertahap mulai tahun 2019 dan 2020 menjadi 51,65 persen. Sedangkan angka Rasio DAK, pada periode 2017-2020 berfluktuasi, dimana nilai rasio DAK pada tahun 2017 adalah sebesar 13,25 persen dan kemudian naik-turun pada tahun 2018 - 2020 menjadi 17,65 persen. Untuk data perbandingan DAU dan DAK Kabupaten Mukomuko periode 2017-2020 dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Rasio DAU dan DAK Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020



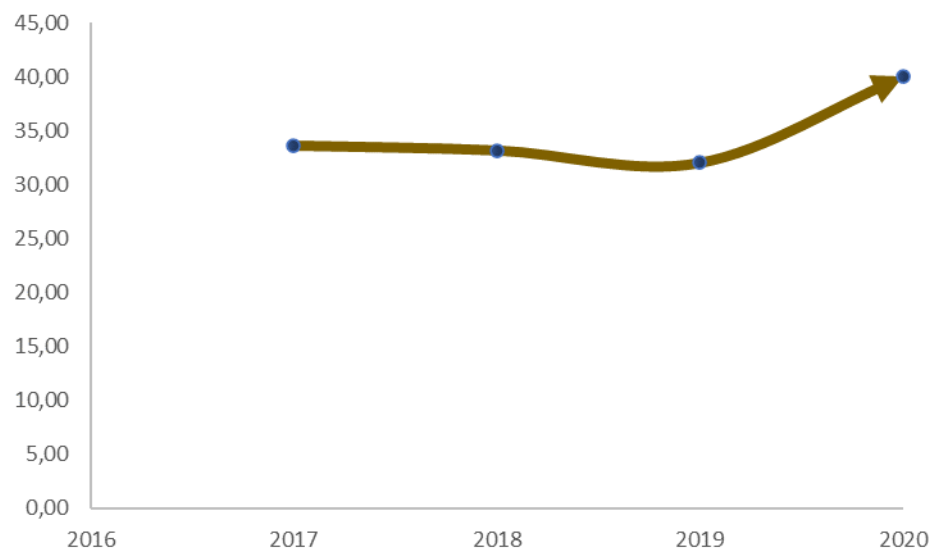
2.5 Rasio Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan Rasio Belanja Pegawai adalah Rasio antara total Belanja Pegawai dengan total Belanja Daerah.

Berdasarkan data APBD pada periode 2017 - 2020, nilai rasio belanja pegawai mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2017 nilai rasio belanja pegawai adalah sebesar 33,59 persen dan menurun sampai Tahun 2019 sebesar 32,0 persen, dan merangkak naik pada Tahun 2020 hingga 39,96 persen.

Jika dilihat lebih jauh nilai Belanja Pegawai Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2020 mencapai 357,71 Miliar Rupiah, jika dibandingkan dengan nilai PAD yang bernilai 85,41 Miliar Rupiah pada Tahun 2020 maka nilai Belanja Daerah jauh lebih besar. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mukomuko tidak mencukupi untuk membayar upah gaji pegawai daerah dan belanja pegawai lainnya, maka dari itu Kabupaten Mukomuko memiliki ketergantungan keuangan yang sangat besar terhadap dana transfer pusat.

Gambar 5. Rasio Belanja Pegawai Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (persen)



TAHU KAH KAMU

Di Tahun 2020 total Belanja Pegawai Kabupaten Mukomuko 4,19 kali lipat lebih besar dari nilai PAD nya.

2.6 Rasio Belanja Modal

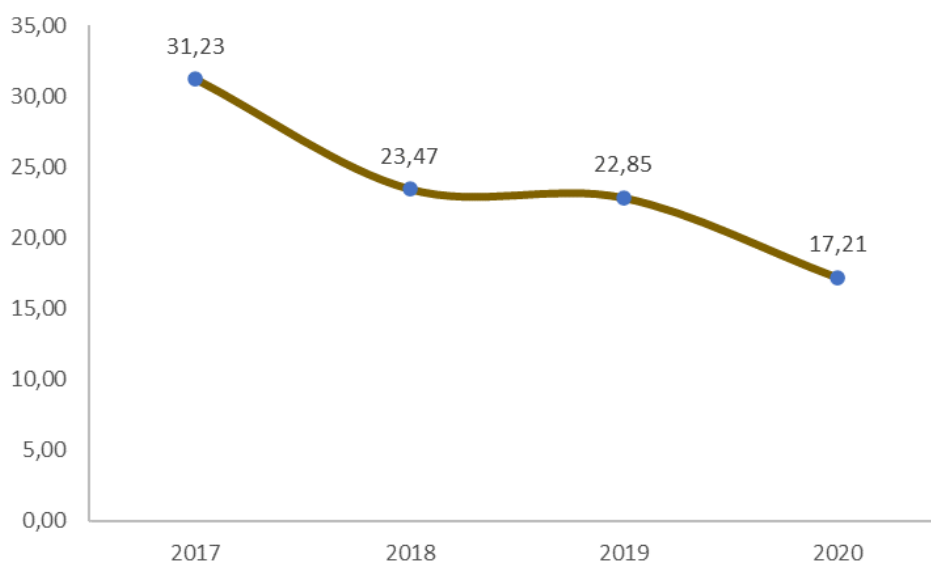


TAHU KAH KAMU

Rasio Belanja Modal Kabupaten Mukomuko terus menyusut yang mulanya 31,23 persen pada Tahun 2017 menjadi hanya 17,21 persen pada Tahun 2020.

Modal merupakan investasi untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan/manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alatalat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan dan pemeliharaan pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, dan lainnya. Besarnya rasio belanja modal dapat berindikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan lain setelah kebutuhan primer seperti untuk pembiayaan gaji pegawai. Belanja modal juga digunakan untuk penghitungan nilai tambah bruto berupa penyusutan barang modal, sehingga semakin besar belanja modal maka berdampak semakin besarnya nilai PDRB sektor jasa pemerintah. Pada periode 2017 - 2020 Rasio Belanja Modal Kabupaten Mukomuko terus menurun hingga tersisa 17,21 persen dari total Belanja Daerah, seperti yang terlihat pada gambar 6.

Gambar 6. Rasio Belanja Modal Kabupaten Mukomuko Tahun 2017-2020 (persen)



2.7 Rasio *Government Size*



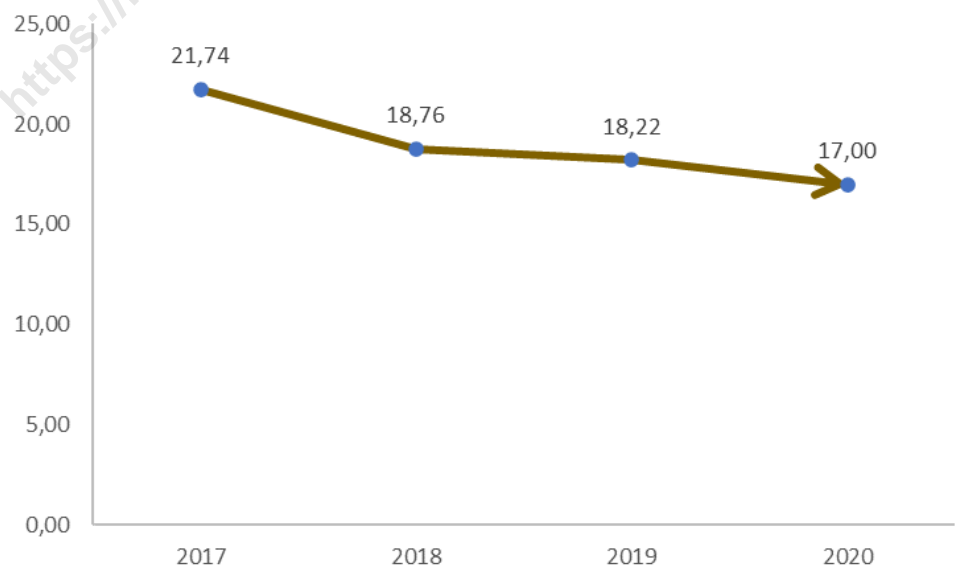
TAHU KAH KAMU

Turunnya Rasio *Government Size* di Kabupaten Mukomuko dari tahun ke tahun mengindikasikan dominasi sektor swasta dalam kegiatan perekonomian daerah.

Rasio *Government Size* merupakan rasio belanja daerah terhadap PDRB daerah tersebut. Angka ini hanya menunjukkan perbandingan antara 2 ukuran sumber pembiayaan (belanja daerah) dan hasil penciptaan dari kegiatan ekonomi daerah (PDRB), dimana belanja daerah dapat merupakan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin kecil nilai rasio ini maka artinya bahwa penciptaan PDRB lebih bersumber kepada sektor lain selain jasa pemerintah. Hal ini dapat berarti sektor swasta lebih mendominasi kegiatan perekonomian di daerah tersebut

Pada periode 2017 - 2020, Rasio *Government Size* Kabupaten Mukomuko selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Rasio *Government Size* Kabupaten Mukomuko sebesar 21,74 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 yang menyentuh nilai 17 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama sektor swasta lebih mendominasi kegiatan perekonomian di Kabupaten Mukomuko.

Gambar 7. Rasio *Government Size* Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (persen)



2.8 Laju Pertumbuhan PAD



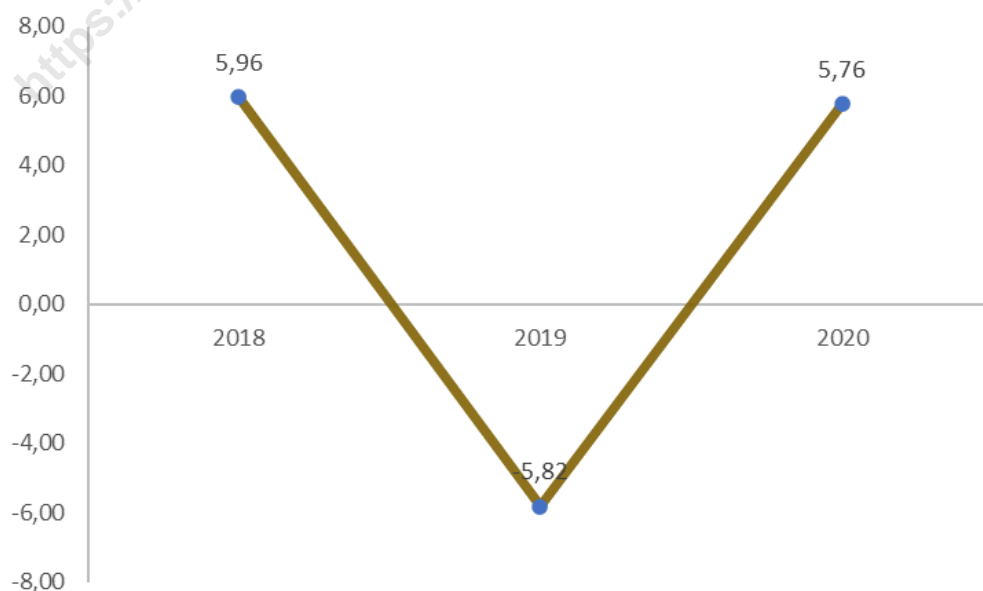
TAHU KAH KAMU

Pertumbuhan PAD negatif mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih jauh dari kata menuju mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, dan pertumbuhan PAD Kabupaten Mukomuko selalu negatif

Jika PAD menunjukkan kemandirian suatu daerah, Laju Pertumbuhan PAD merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kecepatan suatu daerah dapat tumbuh mandiri (tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat). Semakin cepat laju pertumbuhan PAD maka semakin cepat juga daerah tersebut dapat mandiri. Sebaliknya jika pertumbuhan PAD lambat atau bahkan negatif, hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih jauh dari kata menuju mandiri dan masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Pada periode 2017 - 2020 pertumbuhan PAD Kabupaten Mukomuko berfluktuasi, sempat turun dan menyentuh angka minus di Tahun 2019 namun kembali naik dan menyentuh angka positif di Tahun 2020 mencapai 5,76 persen. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan penerimaan dari pajak daerah.

Gambar 8. Laju Pertumbuhan PAD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 - 2020 (persen)



2.9 Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan



TAHU KAH KAMU

Laju Pertumbuhan Penerimaan Daerah Kabupaten Mukomuko cenderung turun dari tahun ke tahun, salah satu penyebabnya adalah karena pandemic COVID-19.

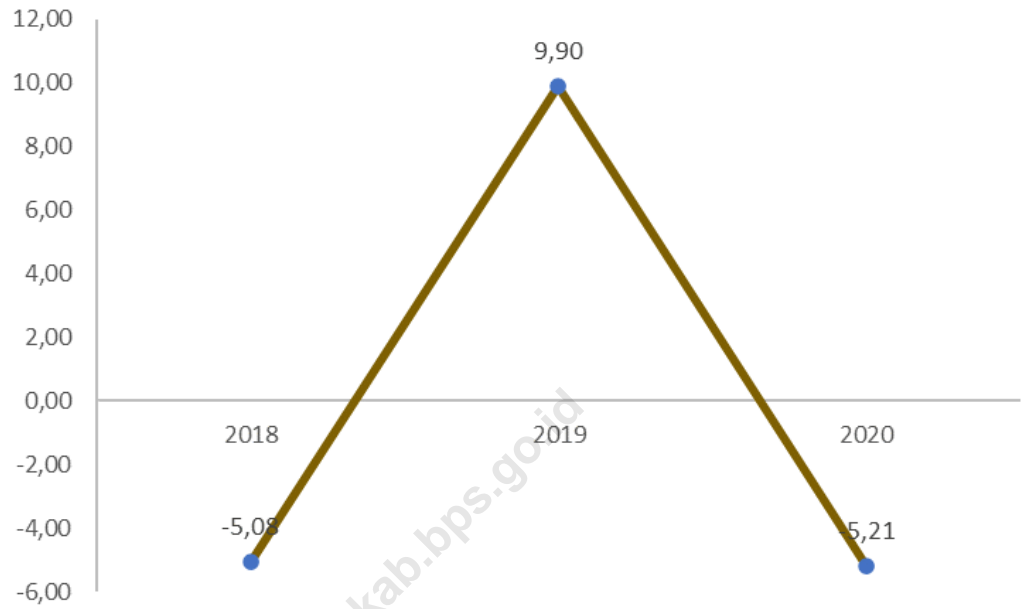
Setelah membahas mengenai laju PAD yang menunjukkan kecepatan suatu daerah dapat tumbuh mandiri (tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat). Penting untuk kita membahas mengenai laju pertumbuhan penerimaan/pendapatan secara total, baik itu pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang diterima dari bantuan daerah lain/pusat, karena pada dasarnya total pendapatan inilah yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintahan Kabupaten Mukomuko untuk mensejahterakan penduduknya.

Jika melihat laju total penerimaan, kita akan temui bahwa pada 4 tahun terakhir total penerimaan Kabupaten Mukomuko berfluktuasi, dimana pertumbuhan penerimaan terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2019. Penurunan penerimaan pada tahun 2020 ini dianggap hal yang sangat wajar, karena pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 total penerimaan Kabupaten Mukomuko mengalami pertumbuhan sebesar 9,90 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -5,21. Untuk data yang lebih rinci dapat dilihat pada gambar 9.

Peningkatan total penerimaan yang terjadi di Kabupaten Mukomuko disebabkan karena bantuan dari Pemerintahan pusat. Sejatinya bantuan memang bukanlah hal yang baik untuk daerah yang ingin mandiri, karena bantuan tersebut dapat membuat daerah tersebut terlena dan selalu mengharapkan bantuan pemerintah pusat. Akan tetapi, Jika dieksekusi dengan tepat, bantuan dapat menjadi jalan keluar atau menjadi jalan pintas dalam menuntaskan masalah kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat Mukomuko. Sebagai contoh jika bantuan tersebut digunakan untuk melakukan percepatan ekonomi dengan membangun fasilitas ekonomi seperti jalan, pasar, dan fasilitas lainnya agar roda perekonomian masyarakat berputar lebih cepat. Atau bantuan tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan,

dan percepatan kesejahteraan masyarakat lainnya, maka bantuan tersebut merupakan hal yang positif dan bermanfaat.

Gambar 9. Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 - 2020 (persen)



2.10 Laju Pertumbuhan PDRB

Selain PAD dan total penerimaan, terdapat ukuran lain yang menunjukkan perputaran ekonomi di suatu daerah, yaitu PDRB. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan volume produk yang dihasilkan suatu daerah (tanpa pengaruh inflasi). Pertumbuhan PDRB juga sering dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin besar pertumbuhan PDRB maka semakin baik roda perekonomian suatu daerah.

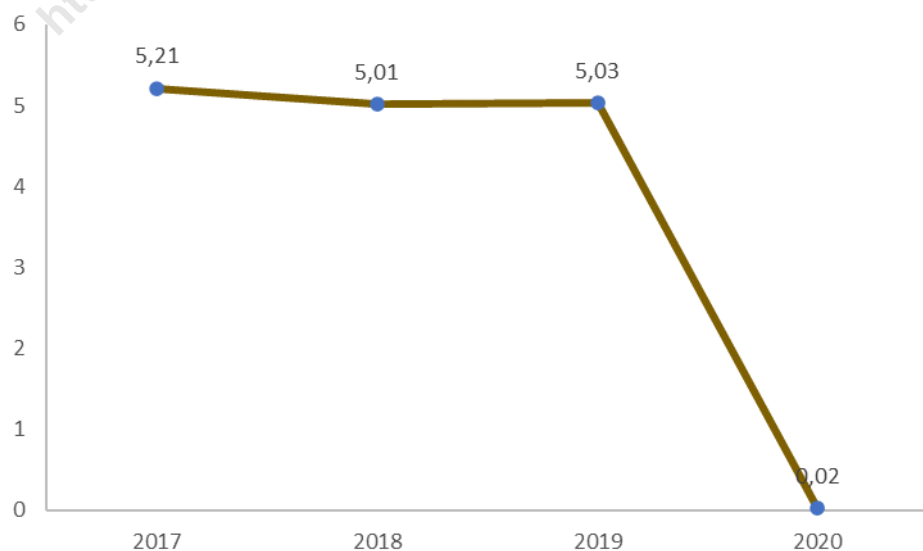


TAHU KAH KAMU

Laju Pertumbuhan Penerimaan Daerah Kabupaten Mukomuko cenderung turun dari tahun ke tahun, salah satu penyebabnya adalah karena pandemic COVID-19.

Pada periode 2017 - 2020 pertumbuhan PDRB Kabupaten Mukomuko terus meningkat. Pada tahun 2017 PDRB kabupaten Mukomuko tumbuh sebesar 5,21 persen, pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Mukomuko tumbuh sebesar 5,01 persen, begitupun hingga Tahun 2019 masih tumbuh cukup signifikan di angka 5,03 persen, akan tetapi pada Tahun 2020 pertumbuhannya tidak signifikan namun tetap positif, yakni di angka 0,02 persen. Pertumbuhan PDRB di kala pandemi menunjukkan bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Mukomuko merupakan sektor yang tidak terlalu sensitif terhadap dampak Covid-19.

Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (persen)



<https://mukomukokab.bps.go.id>

BAB III

LAMPIRAN

Tabel 2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan	Belanja Daerah
(1)	(2)	(3)
2017	894,72	942,73
2018	849,29	890
2019	933,37	939,4
2020	884,75	895,07

Tabel 3. Realisasi Rincian Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)

Rincian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PAD	80,93	85,75	80,76	85,41
2. Transfer Ke Daerah	681,55	632,24	714,82	653,65
2.1 DBH	24,39	21,37	22,84	19,13
2.2 DAU	491,96	492,56	503,54	457
2.3 DAK	118,56	118,31	164,35	156,15
2.4 DID	46,65	0	24,09	21,37
3. Dana Desa	115,06	106,54	124,13	122,88
4. Pendapatan Lainnya	138,72	162	16,87	25,99
Total	894,72	849,29	933,37	884,75

Tabel 4. Realisasi Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 - 2020 (Miliar Rupiah)

Rincian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Pegawai	316,70	295,03	300,61	357,71
Belanja Barang dan Jasa	158,36	224,12	242,32	144,05
Belanja Modal	294,37	208,86	214,62	154,06
Belanja Lainnya	173,30	162,00	181,85	239,25
Total	942,73	890	939,40	895,07

Tabel 5. Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan PAD, dan Pertumbuhan Penerimaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018-2021 (persen)

Pertumbuhan	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan PAD	5,96	-5,82	5,76
Pertumbuhan Penerimaan	-5,08	9,90	-5,21
Pertumbuhan PDRB	5,01	5,03	0,02

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://mukomukokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUKOMUKO**

Jl. Imam Bonjol, Komplek Pemda Mukomuko 38355

Telp (0737) 71633; Fax.(0737) 71633;

E-mail : bps1706@bps.go.id;

Homepage : <http://mukomukokab.bps.go.id>